

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank secara umum berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Pengertian bank menurut Kasmir, (2014;25) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu aktivitas bank yang menjadi penghasilan terbesar adalah memberikan pinjaman kredit. Tujuan dari pemberian kredit salah satunya adalah untuk membantu organisasi atau instansi dalam mengembangkan bisnisnya agar berjalan sesuai apa yang ingin dicapai untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kasmir (2011;96) menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan kepada calon penerima kredit, bank harus merasa yakin kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Hal tersebut dikarenakan bank ingin memperkecil adanya resiko yang timbul. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debiturnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar (Kasmir, 2012;95).

Menurut Kasmir (2012; 143) Prosedur kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Aminah dan Darmawijaya (2015) Sistem dan prosedur pemberian kredit yang baik akan dapat membantu bank dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, sehingga dapat mengantisipasi sebab- sebab terjadinya kegagalan kredit.

Pato (2013) Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang diterapkan oleh bank telah terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan kredit, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara langsung ke calon debitur. Analisis kredit digunakan untuk meneliti atau menilai permohonan kredit secara mendalam untuk mengetahui keadaan calon debitur dan mencegah terjadinya kredit macet.

Dalam pemberian kredit telah dikenal adanya “5C” principles, yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economic*) (Kasmir, 2012; 136). Dari kelima prinsip tersebut, collateral (jaminan) atau lebih dikenal dengan agunan merupakan hal yang penting dalam kebijakan pemberian kredit, karena permasalahan yang sering dihadapi oleh bank adalah resiko tidak tertagihnya kredit (kredit macet). Hendaknya tiap kredit yang disalurkan oleh bank disertai juga jaminan atau agunan, sebagai upaya bagi bank untuk memperkecil risiko dalam penyaluran kredit tersebut. Pengertian dari agunan ini adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.

Penyaluran kredit diperlukan adanya pengendalian intern agar terhindar dari segala bentuk resiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Pengendalian Internal

menurut COSO (*committe of sponsoring organizations*) menyatakan bahwa pengendalian intern menjadi dorongan yang diberikan kepada seseorang atau karyawan dari bagian tertentu dari organisasi atau organisasi secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan tujuan.

Menurut Krismiaji (2010; 218) menyatakan pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013: 163).

Setiap pemberian kredit, pasti dihadapkan kepada resiko macet. Artinya munculnya kredit macet bukanlah hal yang mustahil. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko dapat dikatakan sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kredit macet merupakan permasalahan yang sering muncul baik di negaranegara berkembang maupun di negara maju. Perusahaan- perusahaan besar pun resiko kredit bermasalah tetap ada (Nasrun, 2012). Kuncoro dan Suhardjono (2011; 420) mendefinisikan kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Fenomena pemberian kredit pada bank menimbulkan sebuah masalah yaitu terjadinya kredit bermasalah atau Non- Performing Loans (NPL) menurut Mahmoeddin (2010;1) merupakan kredit yang menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit. Pada umumnya NPL merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. *Non- Performing Loans* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 besarnya NPL yaitu 5%. Jika suatu bank mempunyai NPL lebih dari 5% maka bank tersebut mempunyai kredit yang tidak sehat. Hal ini juga berkaitan terhadap penyaluran kredit di bank tersebut, karena penyaluran kredit yang sehat dilihat dari lebih besarnya kredit yang diberikan kepada debitur dibandingkan dengan kredit bermasalah. Semakin tinggi NPL akan menurunkan jumlah kredit yang disalurkan, begitupun sebaliknya. Semakin tinggi NPL maka semakin besar pula resiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Hal ini menunjukkan bahwa NPL mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyaluran kredit.

Haninun (2011) Untuk menunjang keberhasilan pengawasan kredit, bank harus mempunyai sistem pengendalian internal yang cukup memadai. Sistem pengendalian internal kredit tersebut harus dapat diterapkan dalam semua tahap proses penyaluran kredit, mulai dari saat permintaan kredit diajukan oleh debitur sampai saat kredit dibayar lunas. Sistem pengendalian internal harus memberikan peluang kepada bank untuk melakukan pengawasan ganda, terutama pada tahap- tahap penyaluran kredit yang mengandung kerawanan penyalahgunaan oleh semua pihak yang terkait dalam pemberian kredit atau dapat merugikan bank. Sistem pengendalian internal juga harus memberikan kemungkinan bank untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya pelanggaran atas kebijakan pokok penyaluran kredit dan prosedur pelaksanaan

pemberian kredit.

Bank harus benar-benar memperhatikan dipatuhinya sistem pengendalian internal dalam pemberian fasilitas kredit sehingga risiko akan adanya kredit yang bermasalah dapat diperkecil. Kredit yang bermasalah ini dapat mengganggu kelancaran usaha bank yang tentunya dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang memadai, terutama dalam bidang perkreditan berarti menunjukkan sikap kehati-hatian bank dalam menjaga kepercayaan dari masyarakat dan dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya. Sistem pengendalian internal dalam memberikan kredit yang digunakan berdasarkan pada unsur pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*). Menurut Ummah (2010) Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk atau dikenal dengan Bank Jatim ini memiliki beberapa produk kredit diantaranya Kredit Mikro, Kredit Agrobisnis dan Ritel, Kredit investasi, serta Kredit Korporasi. Salah satu kredit yang ditawarkan Bank Jatim adalah kredit korporasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur berstatus Badan Hukum (Corporate Loans) dan dalam jumlah kredit berskala menengah atau besar. Bank Jatim adalah salah satu contoh bank meminjamkan kredit korporasi yang sudah banyak digunakan oleh organisasi atau instansi menjadi orang ketiga dalam urusan bisnisnya, kredit korporasi bank jatim bertujuan untuk pembiayaan yang bersifat produktif (modal kerja dan investasi produktif). Sasaran kredit di bank jatim yaitu perusahaan atau instansi perorangan yang sudah berbadan hukum serta mempunyai agunan, yang membutuhkan kredit untuk kepentingan usahanya baik untuk modal kerja maupun investasi guna menunjang usaha. Kredit korporasi lebih banyak diminati karena memiliki suku bunga yang lebih rendah dari kredit lainnya.

Bank Jatim cabang Gresik sebagai salah satu lembaga penyedia jasa perbankan khususnya penyaluran kredit korporasi, telah memiliki panduan terkait langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah, panduan tersebut dituangkan kedalam standar operasional (SOP) yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan proses penyelesaian terhadap seluruh kredit bermasalah yang terjadi di Bank Jatim cabang Gresik. Adanya standar operasional prosedur tersebut, ternyata tidak serta merta dapat diterapkan kedalam praktek lapangan.

Pentingnya dilakukan penelitian ini karena sistem pengajuan kredit dan pengendalian internal dalam proses pemberian kredit ini sangat diperlukan agar memudahkan para nasabah dalam proses pengajuan kredit dan memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Selain itu, agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan sistem, serta mengurangi terjadinya resiko kredit macet maka diperlakukan suatu pengendalian internal sebagai fungsi kontrol dan pengendalian dari sistem tersebut, sehingga sistem yang sudah didesain dan diimplementasikan dengan baik tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan membahas dan menganalisa sistem pengendalian internal pada prosedur pemberian kredit korporasi yang dilaksanakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk cabang Gresik dengan mengangkat judul : **“Analisis Pengendalian Internal Prosedur Pemberian Kredit Korporasi (Studi Kasus pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang ada, secara spesifik dan lebih rinci, masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pada proses pemberian kredit

korporasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk cabang Gresik?

2. Apakah sistem pengendalian internal pada proses pemberian kredit korporasi telah diterapkan secara efektif pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengendalian internal pemberian kredit korporasi dan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan yaitu antara lain :

1. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Gresik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan analisis pengambilan keputusan tentang pemberian kredit.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi kemajuan studi dan perkembangan ilmu akuntansi khususnya dibidang kredit.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai analisis pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit multiguna pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Gresik.

1.3 Kontribusi Penelitian

Hesty (2013) dalam penelitiannya mengenai Penerapan SPI dalam menunjang efektifitas pemberian kredit usaha pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Boulevard Manado. Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menganalisis pengendalian internal pemberian kredit dalam suatu bank dan juga sama-sama menggunakan metode deskriptif.

Robin Gita, dkk (2014) melakukan penelitian tentang analisis sistem pengendalian internal pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDES) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun. Metode yang digunakan yaitu metode pengambilan sampel *simple random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini menggunakan sistem pengendalian intern sebagai permasalahan yang diangkat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan wawancara. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif.